

***COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT BUKIT ASAM TBK TANJUNG ENIM***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh :

**Triani Novelia
NIM. 07011282025118**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT BUKIT ASAM TBK TANJUNG ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh:

**TRIANI NOVELIA
NIM. 07011282025118**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 20 Maret 2024

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal



20 / 2024
03

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT BUKIT ASAM TBK TANJUNG ENIM**

SKRIPSI

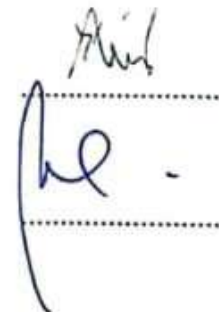
**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 08 Mei 2024**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003



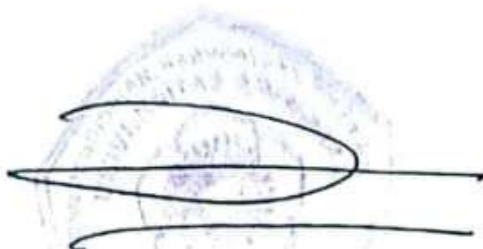
Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc
NIP. 196512071992031004



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triani Novelia
NIM : 07011282025118
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "***Collaborative Governance Pada Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim***" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, Maret 2024



Triani Novelia

NIM. 07011282025118

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Because tomorrow isn’t promised, so you better make sure that you are living today. So, don’t wait, make what you want happened!”

Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda (Arman) dan Ibunda (Herlina);
2. Saudara dan Saudariku Yeyen Sari, Suryadi Hidayat, Tuti Ertika, dan Arifky;
3. Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI;
4. Teman-teman seperjuangan;
5. Almamater saya, Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* Pada Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kekayaan sumber daya alam yang memadai di Kabupaten Muara Enim belum mampu menurunkan angka kemiskinan masyarakat sekitar, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program CSR perusahaan setempat yang terindikasi belum tepat sasaran, salah satunya PT Bukit Asam Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007), dengan hasil penelitian berupa pada kondisi awal ditunjukkan dengan adanya pengelolaan keterbatasan sumber daya dan kekuasaan melalui pembentukan Forum CSR dan pelaksanaan MoU, yang diikuti dengan kesamaan latar belakang untuk berkolaborasi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Desain kelembagaan ditunjukkan melalui keterlibatan dan pembagian tanggung jawab yang dibahas dalam Forum CSR dan MoU. Kepemimpinan fasilitatif ditandai dengan adanya responsivitas dari Pemerintah daerah Muara Enim dan PT Bukit Asam untuk lebih memperluas partisipasi dan cakupan proses dalam berkolaborasi. Proses kolaborasi pada tahap *face to face dialog* dilakukan melalui pembahasan bersama antar pihak terlibat, kepercayaan antar pihak sudah terjalin dengan baik, komitmen terhadap proses ditunjukkan pula melalui penandatanganan MoU dan adanya proses *monitoring* serta evaluasi terhadap program yang terlaksana, hanya saja dalam aspek ini terdapatnya keterbatasan PTBA dalam mengelola semua aspek secara efektif sehingga menimbulkan stigma perbedaan perlakuan terhadap masyarakat sebagai partisipan salah satu program CSR. Dalam aspek saling memahami, terdapat perbedaan persepsi mengenai kebutuhan pendanaan dalam kolaborasi yang dilakukan melalui MoU, dimana Bappeda sebagai wakil Pemerintah daerah Muara Enim berpendapat bahwa besaran dana pembangunan yang diberikan oleh PT Bukit Asam belum cukup sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Hasil sementara dari proses kolaborasi ini tercermin dari manfaat positif yang dirasakan masyarakat akan adanya program CSR PT Bukit Asam serta penurunan angka kemiskinan di Muara Enim dari 11,12% pada Tahun 2022 menjadi 10,93% pada Tahun 2023 terakhir.

Kata kunci : *Collaborative governance, Corporate Social Responsibility, Kerjasama*

Indralaya, Maret 2024

Pembimbing

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

ABSTRACT

This research aims to find out how Collaborative Governance in the Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim. This research is motivated by the fact that the wealth of natural resources is adequate in Muara Enim Regency which has not been able to reduce the poverty rate of the surrounding community. This is related to the implementation of local companies' CSR programs which are indicated as not being on target, one of which is PT Bukit Asam Tbk. This study used qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. This research uses the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash (2007), with research results in the form of starting conditions indicated by the management of limited resources and power through the formation of a CSR Forum and the implementation of an MoU, which is followed by a common background for collaboration, namely community welfare. Institutional design is demonstrated through involvement and division of responsibilities discussed in the CSR Forum and MoU. Facilitative leadership is characterized by responsiveness from the Muara Enim regional government and PT Bukit Asam to further expand participation and the scope of the collaboration process. The collaboration process at the face to face dialogue stage is carried out through joint discussions between the parties involved, trust between the parties has been well established, commitment to the process is also demonstrated through the signing of the MoU and the monitoring and evaluation process of the program being implemented, however, in this aspect, PTBA is limited in managing all aspects effectively, giving rise to the stigma of different treatment towards the community as participants in one of the CSR programs. In the aspect of share understanding, there are differences in perception regarding funding needs in collaboration carried out through the MoU, where Bappeda as the representative of the Muara Enim regional government is of the opinion that the amount of development funds provided by PT Bukit Asam is not sufficiently commensurate with the income they generate. The intermediate results of this collaboration process are reflected in the positive benefits felt by the community from the PT Bukit Asam CSR program as well as the reduction in the poverty rate in Muara Enim from 11.12% in 2022 to 10.93% in 2023.

Keywords: Collaborative governance, Corporate Social Responsibility, cooperation

Indralaya, March 2024

Head of the Department of Public
Administration

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

Advisor

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance Pada Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim*” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Adapun dalam penulisannya, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulisan skripsi ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diterima dan disetujui pada saat sidang seminar proposal skripsi.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, dengan berbagai doa dan dukungannya yang secara langsung maupun tidak langsung, penulis menghantarkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua terkasih, Ayahanda Arman dan Ibunda Herlina.
2. Keluargaku tersayang Yeyen Sari, Suryadi Hidayat, Tuti Ertika Sari, A. Rifky Hidayat, Hadi Kaswara, dan Ismeiyeni atas doa, semangat, dan dukungan yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada penulis selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas dukungan serta bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku Pembimbing Akademik
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Seluruh staf dan karyawan satuan kerja *Sustainability* dan Rumah BUMN PT Bukit Asam Tanjung Enim.
9. Seluruh staf dan karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Seluruh staf dan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
11. Seluruh bagian masyarakat di Muara Enim yang telah terlibat dan membantu selama penelitian ini berlangsung.
12. Teman seperjuangan, Aisyah Zahra, Frisillia Ardia G, Ilymyria Farahdila, Rizki Ana, terima kasih atas semangat, motivasi, dukungan, dan perjuangan bersamanya selama masa perkuliahan.
13. Temanku tersayang Caca, Dita, Febby, Mise, dan Tiara yang selalu memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Nadila, Elsa, Rosyid, Anin dan Kak Natasya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar skripsi ini lebih berkualitas dan bermanfaat umumnya bagi yang membaca, serta khususnya bagi penulis sendiri.

Indralaya, Maret 2024



Triani Novelia

NIM. 07011282025118

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Collaborative Governance</i>	12
2.1.2 Pembangunan Daerah	20
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25

2.3	Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN		34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Definisi Konsep	35
3.3	Fokus Penelitian	36
3.4	Jenis dan Sumber Data	38
3.5	Informan Penelitian	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data	39
3.7	Teknik Analisis Data	40
3.8	Sistematika Penulisan	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	54
4.3	Hasil Penelitian.....	56
4.3.1	Kondisi Awal (<i>Starting Condition</i>).....	58
4.3.2	Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>).....	67
4.3.3	Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	73
4.3.4	Proses Kolaborasi (<i>Collaboration Process</i>)	85
4.4	Contoh Program CSR dalam Collaborative Governance antara PT Bukit Asam dengan Pemerintah Daerah Muara Enim	105
4.5	Pembahasan	108
4.5.1	Kondisi Awal (<i>Starting Condition</i>).....	109
4.5.2	Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>).....	111
4.5.3	Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	112
4.5.4	Proses Kolaborasi (<i>Collaborative Process</i>).....	113
BAB V.....		119

KESIMPULAN DAN SARAN	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	36
Tabel 3. 2 Informan Penelitian	38
Tabel 4. 1 Deskripsi Informan Penelitian	55
Tabel 4. 2 Data Persentase Kemiskinan di Muara Enim 2016-2023.....	104
Tabel 4. 3 Matriks Hasil dan Temuan Penelitian	116

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Muara Enim.....	9
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Research Mapping	4
Gambar 2. 1	Model Collaborative Governance Ansell and Gash (2007)	15
Gambar 2. 2	Kerangka Berpikir	33
Gambar 3. 1	Teknik Analisis Data.....	41
Gambar 4. 1	Peta Administrasi Muara Enim.....	44
Gambar 4. 2	Logo PT Bukit Asam.....	46
Gambar 4. 3	Struktur Organisasi PT Bukit Asam	48
Gambar 4. 4	Struktur Organisasi Satuan Kerja Sustainability PT Bukit Asam	49
Gambar 4. 5	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Muara Enim	51
Gambar 4. 6	Struktur Organisasi BAPPEDA Muara Enim.....	53
Gambar 4. 7	Struktur Organisasi Kecamatan Lawang Kidul	54
Gambar 4. 8	Maksud dan Tujuan dibentuknya Forum CSR-PKBL Muara Enim... ..	60
Gambar 4. 9	Ruang Lingkup CSR-PKBL Muara Enim	61
Gambar 4. 10	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bukit Asam dengan Pemerintah Daerah Muara Enim	62
Gambar 4. 11	Visi dan Misi Satuan Kerja <i>Sustainability</i> PT Bukit Asam.....	64
Gambar 4. 12	Susunan Tim Forum CSR-PKBL Muara Enim	69
Gambar 4. 13	Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Unit Forum CSR-PKBL Muara Enim	70
Gambar 4. 14	Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Program Musrenbang CSR PT Bukit Asam Tbk di Kab. Muara Enim Tahun 2021	71
Gambar 4. 15	Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Program Musrenbang CSR PT Bukit Asam Tbk di Kab. Muara Enim Tahun 2021	79
Gambar 4. 16	Contoh Program CSR PT Bukit Asam	82
Gambar 4. 17	Contoh Koordinasi antara PTBA dengan OPD Muara Enim	84
Gambar 4. 18	Musyawarah dan Rapat dalam Forum CSR-PKBL Muara Enim.....	87
Gambar 4. 19	Kegiatan Musrenbang RKPD Kab. Muara Enim	88
Gambar 4. 20	Rapat Koordinasi Forum CSR-PKBL Muara Enim	88
Gambar 4. 21	Contoh Laporan Pengukuran SROI Pada Program CSR PTBA Tahun 2023	95

Gambar 4. 22 Kegiatan Pelatihan Mitra Binaan CSR PT Bukit Asam	97
Gambar 4. 23 SIBA Center.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	128
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	132
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	169
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	171
Lampiran 5. SK Dosen Pembimbing.....	175
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian.....	177
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	178
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi.....	179
Lampiran 9. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	180

DAFTAR SINGKATAN

AM	: <i>Assistant Manager</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABPN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AVP	: <i>Assisstant Vice President</i>
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
Kabid	: Kepala Bidang
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
PKBL	: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PT	: Perseroan Terbatas
PTBA	: Perseroan Terbatas Bukit Asam
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Satker	: Satuan Kerja
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
Sekda	: Sekretaris Daerah
SIBA	: Sentra Industri Bukit Asam
SROI	: <i>Social Return on Investment</i>
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya berkesinambungan dalam menciptakan kondisi yang memberikan beragam alternatif yang dapat diterima oleh publik dengan mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan daerah berperan dalam meningkatkan kualitas hidup publik secara berkelanjutan hingga mencapai kesejahteraan. Pembangunan dalam hal ini menyangkut beberapa aspek diantaranya ialah pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, dan lainnya. Melalui proses pembangunan, maka diharapkan dapat terciptanya perubahan yang terencana dengan mengelola potensi alam, manusia, serta aspek sosial dan budaya suatu wilayah. Pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah tentunya memiliki berbagai keterbatasan dalam pemenuhan setiap kebutuhan publik tersebut, hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk memulai proses kolaborasi atau sinergitas dengan para *stakeholder* yang ada.

Pada hakikatnya, pencapaian keberhasilan dalam pembangunan daerah bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, namun membutuhkan kontribusi *stakeholder* lainnya dalam mewujudkan proses tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan pengarahannya dan peluang lebih banyak bagi para *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan melalui konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan suatu model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau

mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. (Ansell and Gash, 2007). Dengan adanya proses kolaborasi ini, diharapkan akan menyalurkan dampak positif yang terasa nyata oleh masyarakat sekitar.

Salah satu upaya kolaboratif tersebut dapat diimplementasikan yakni melalui kerjasama antara Pemerintah dan Perusahaan dalam hal ini PT Bukit Asam (PTBA). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi landasan utama terkait perlunya terjalin kolaborasi yang memadai antara pemerintah dan badan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, PTBA telah berkomitmen secara aktif melakukan pendekatan secara inklusif dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan dan mendukung kegiatan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang. Selain itu, perusahaan juga menjamin keterlibatan pemangku kepentingan lokal serta berkolaborasi dengan pemerintahan, masyarakat lokal dan lembaga terkait melalui proses perencanaan dan *monitoring* program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, dimana salah satu strategi pelaksanaan TJSL PTBA yaitu komunikasi dan koordinasi secara intens dengan holding, pemerintah setempat, perusahaan BUMN lainnya, serta Kementerian BUMN terkait pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tepat yang sesuai dengan pedoman komunikasi kepada pihak eksternal.

Pelibatan pemangku kepentingan yang dilakukan PTBA melalui TJSL melengkapi aktivitas bisnis, produk dan jasa yang dikelola Perusahaan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Implementasi Program TJSL dan dukungannya terhadap TPB sekaligus merupakan kepatuhan PTBA terhadap POJK

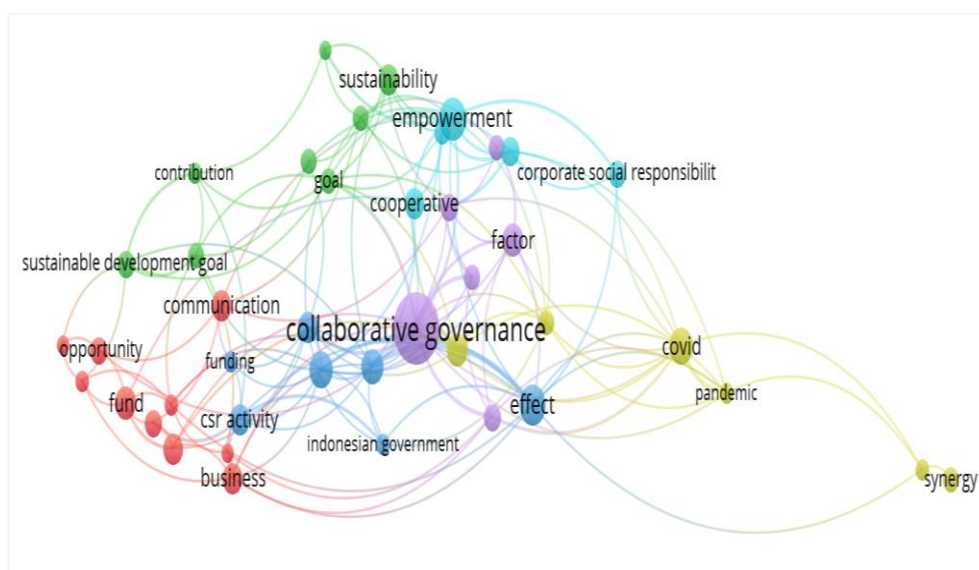
No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam hal ini, Perusahaan menyusun prioritas TPB dengan menganalisa risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan TJSL tersebut. Di PTBA, pelaksanaan TJSL dilakukan oleh Satuan Kerja *Sustainability*, yang dipimpin oleh *Vice President Sustainability* yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur SDM.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah komitmen yang dijalankan suatu perusahaan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, namun masih berada dalam lintasan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan (Zaidi et al., 2016). Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, pemangku peentingan, dan masyarakat dikenal sebagai CSR. (Blowfield, 2005). Pada hakikatnya, CSR merupakan suatu mekanisme alami sebuah perusahaan memperoleh keuntungan yang terkadang merugikan orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dampak merugikan tersebut dapat berupa pencemaran lingkungan hingga eksploitasi sumber daya alam yang ada, oleh sebab itu keberadaan CSR sendiri dipandang sebagai bentuk kewajiban perusahaan untuk membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak yang merugikan tersebut untuk menjadi lebih baik.

Di Indonesia, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan telah diatur dalam beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atas berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan, yang diterjemahkan sebagai Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL). Dalam konteks ini, program tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai komitmen Perseroan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Manfaat dari komitmen ini diharapkan dapat dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Selain itu, regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara, Pada Pasal 20 disampaikan bentuk program TJSL terdiri dari: 1) pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan 2) pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan. Dari peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan CSR sebagai bagian dari kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan di suatu daerah.

Gambar 1. 1 *Research Mapping*



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan Vosviewer, 2023

Berdasarkan hasil pemetaan riset menggunakan *Vosviewer* yang dilakukan peneliti dengan menarik artikel-artikel dari database *google scholar* pada rentang waktu 2018-2023, maka peneliti dapat mengetahui bahwa terdapatnya keterkaitan antara *collaborative governance* dengan *social responsibility*, serta hasil pemetaan juga menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara *collaborative governance* dengan *sustainable development goal*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* berperan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan ini berkaitan dengan topik penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yakni mengenai *collaborative governance* dalam menunjang pembangunan daerah melalui kegiatan *corporate social responsibility*. Dimana, pada penelitian ini akan dibuat menjadi lebih spesifik yaitu *collaborative governance* antara Pemerintah daerah Muara Enim dengan PT Bukit Asam (PTBA) dalam menunjang pembangunan daerah sekitar.

Salah satu penelitian yang membahas tentang bagaimana *collaborative governance* dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Penelitian oleh Trianingrum et al., (2022) dengan judul "*Collaborative Governance In CSR: Praktik CSR PT Pertamina Patra Niaga FT Maos dalam Program Mernek Jernek*". Keberhasilan proses kolaborasi ini ditunjukkan dengan terwujudnya pencapaian berupa peningkatan dalam sektor perekonomian, kesejahteraan, sosial, hingga lingkungan. Hal ini pula tidak terlepas dari adanya dukungan dan keterlibatan kuat dari masing-masing aktor, yakni Perusahaan, Pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi antar aktor ini berjalan secara sinergis dan sesuai dengan peran dari masing-masing pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya keberhasilan dalam proses kolaborasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik serupa dan mencari tahu lebih dalam bagaimana proses *collaborative governance* antara

Pemerintah daerah Muara Enim dengan PT Bukit Asam dapat menunjang pembangunan daerah melalui program CSR-nya, khususnya dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

PT Bukit Asam merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan yang telah menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di kawasan sekitarnya. Pelaksanaan beberapa program yang dilaksanakan merupakan bentuk *collaborative governance* antara PT Bukit Asam dengan Pemerintah daerah Muara Enim. Kolaborasi ini dianggap penting karena memberikan manfaat dua arah antara perusahaan dan pemerintah daerah, dimana keduanya memiliki tujuan atau capaian yang sama dalam hal percepatan pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terlibat termasuk masyarakat setempat sebagai sasaran utama dari adanya kegiatan CSR. Adapun hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari upaya kerjasama ini.

Komitmen PT Bukit Asam dalam proses *collaborative governance* terbukti dengan berjalannya berbagai program CSR yang untuk membantu serta mendukung pengembangan masyarakat sekitar dalam setiap sektor yang meliputi: perekonomian, industri, pendidikan, pertanian, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memberdayakan masyarakat sekitar unit pertambangan yang terdampak langsung dengan adanya aktivitas pertambangan. Komitmen lainnya pula dibuktikan dengan upaya percepatan pembangunan di wilayah Muara Enim yang dilakukan melalui pengalokasian dana CSR.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bukit Asam Tahun 2022, tercatat bahwa dalam program pemberian

bantuan dan/atau kegiatan lainnya CSR PTBA telah menyalurkan dana sejumlah Rp 208,88 Miliar sepanjang tahun 2022. Jumlah ini merupakan suatu peningkatan jika dibandingkan dengan penyaluran tahun 2021 yaitu mencapai Rp 166,20 miliar. Dana tersebut disalurkan dengan tujuan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan fokus kepada empat pilar utama yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Besarnya dukungan pembangunan tersebut, tentu saja tidak terlepas dari berlimpahnya sumber daya alam yang ada di wilayah Muara Enim khususnya batu bara yang telah dikelola oleh PT Bukit Asam sejak lama, hal ini dibuktikan dengan pendapatan yang mereka telah terima, yakni pada tahun 2022. Berdasarkan data *Annual Report* PT Bukit Asam Tahun 2022, tertulis informasi bahwa perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 42,65 triliun, dimana angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 13,39 triliun atau 45,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 29,26 triliun.

Dwi Pamungkas & Priyo Sudibyo (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah telah aktif mendorong upaya pengentasan kemiskinan melalui kemitraan dan kerjasama, menjadi suatu inisiatif yang ditekankan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah mengajak perusahaan swasta, BUMN, BUMD maupun pihak lain untuk berkolaborasi dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui implementasi *CSR* yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mengatur terkait kerjasama yang dapat dilakukan ini.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap Badan Usaha memiliki hak untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan,

yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan. Namun dalam hal ini, banyaknya program yang telah dilaksanakan serta besarnya dukungan oleh PTBA dalam kolaborasinya dengan Pemerintah daerah Muara Enim dinilai belum memberikan dampak yang cukup optimal bagi masyarakat sekitar. PT Bukit Asam diketahui telah melaksanakan kegiatan CSR sejak tahun 2011, sebagai perusahaan yang besar dan memiliki pendapatan yang signifikan setiap tahunnya, tentunya diperlukan kontribusinya dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim, khususnya dalam pengentasan garis kemiskinan masyarakat sekitar.

Namun, pelaksanaan kegiatan CSR yang telah lama dilakukan oleh PTBA belum mampu membawa masyarakat keluar dari kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim masih mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan hasil yang belum optimal dari setiap pihak terlibat termasuk Pemerintah daerah dan PT Bukit Asam dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Hingga tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim masih menyentuh angka yang cukup tinggi yakni 11,12%, dimana angka ini masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional, yaitu 9,54%. Adapun data persentase kemiskinannya dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Muara Enim

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim

Nyatanya, isu kemiskinan masih menjadi masalah yang krusial bagi masyarakat sekitar. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada, terbukti belum cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Permasalahan kemiskinan ini pula berkaitan dengan adanya ketidaktepatan sasaran dalam implementasi program CSR PTBA. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan, dinyatakan bahwa untuk program pemberian bantuan, adanya ketidaktepatan sasaran yang ditunjukkan dengan adanya indikasi bahwa masyarakat yang menerima bantuan merupakan masyarakat yang mampu. Hal ini yang kemudian menimbulkan stigma ketidakadilan dalam masyarakat dan patut untuk dipertanyakan, karena dampak lingkungan akibat adanya aktivitas tambang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat setempat, namun manfaat CSR itu sendiri masih belum cukup optimal dan merata. Adapun permasalahan lainnya disebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah dan Sari (2021), menyatakan bahwa berbagai bantuan oleh CSR PT bukit

Asam belum sepenuhnya direncanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil yang diperlukan masyarakat sekitar. Permasalahan ini kemudian menjadi salah satu faktor belum berhasilnya proses kolaborasi yang dilakukan Pemerintah daerah Muara Enim dengan PT Bukit Asam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi tersebut, masih ada beberapa masalah yang menimbulkan ketidakmerataan pembangunan pada masyarakat. Tingginya angka kemiskinan menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi efektivitas proses kolaborasi antara Pemerintah daerah Muara Enim dengan PT Bukit Asam. Kondisi ini menjadi dasar adanya penelitian ini, sebagai upaya untuk lebih memahami dinamika kolaborasi yang terjalin antara pihak tersebut. Hal ini kemudian menuntut semua aktor baik pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat untuk lebih mampu merumuskan suatu konsep yang dapat menjadi pendorong terwujudnya percepatan pembangunan serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Collaborative Governance Pada Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim?*

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *Bagaimana Collaborative Governance Pada Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang *Collaborative governance* dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim dan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1. Mengasah keterampilan penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi, serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kemampuan penulis dalam menulis.

b. Bagi Pembaca

1. Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat atau pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana *Collaborative governance* dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/referensi dalam penelitian yang memiliki tema yang serupa.

c. Bagi Instansi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah Muara Enim dan PT Bukit Asam dalam merumuskan dan mengambil keputusan ataupun kebijakan kedepannya, sehingga dapat mampu meningkatkan kinerja perusahaannya, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hardi, Warsono, et al. (2020) *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press

Jurnal

- Andayani, P., Sitepu, B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, S., & Dewi, U. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman The Collaborative Governance On The Inclusive Village Pioneering Program At Sendangadi Village Mlati Sub District Sleman Regency. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(3).
- Djabbari, M. H., M, J., Robby, & Saguni, D. S. (2023). Collaborative Governance: Trust Building Indicators in The “Fish Apartment” Community Empowerment Area Development (Cead). *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 4(2), 105–115.
- Dwi Pamungkas, O., & Priyo Sudibyo, D. (2021). Collaborative Governance Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.68>
- Effendi, G. N., & Purnomo, E. P. (2020). Collaboration Government and CSR A Case Study of Suku Anak Dalam in Pompa Air village, Jambi-Indonesia.

International Journal of Academic Research in Business, Art and Science (IJARBAS.COM), 2(1), 19–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3632103>

- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v13i2.3329>
- Lingga Wati, N., Oktariani Halawa, S., Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, U., & Kunci, K. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia Melalui Corporate Social Responsibility. *Journal of Comprehensive Science*, 1(2), 50–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v1i2.11>
- Mayasari, S. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam (PTBA) dalam Penanganan Pandemi Virus Corona di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.56873/jimk.v6i1.108>
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 : Studi di Kabupaten Lampung Selatan. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15–31.
- Salsabila, L., & Sadayi, D. P. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 6(1), 28–34. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5452>
- Seferiyanto, A., Novaria, R., & Widiyanto, M. K. (2021). Pelaksanaan Program CSR Pt Japfa Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Seminar Nasional Hasil Skripsi*, 01(01), 2016–2020.
- Silvina, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam (PTBA) dalam Penanganan Pandemi Virus Corona di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi*, 6(1), 11-18.
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Fadhlia, M. N. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. *IGJ: Indonesian Governance Journal*

(KajianPolitik-Pemerintahan),<https://igj.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/view/6652>

Trianingrum, S., Cindy Arfidiandra, A., Adib Tsani, F., Fardian Anggoma, F., & Maulana Mubarak, A. (2022). Collaborative Governance In CSR: Praktik CSR PT Pertamina Patra Niaga FT Maos Dalam Program Mernek Jernek (Collaborative Governance in CSR: CSR Practices of PT Pertamina Patra Niaga FT Maos in the Mernek Jenek Program). *Jurnal CARE*, 7(1), 1–14. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalcare/article/view/43536>

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (2024). *Kabupaten Muara Enim Dalam Angka (Muara Enim Regency in Figures) 2024*. 34, 1–392. muaraenimkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (2023). Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022. Retrieved 2023, from <https://muaraenimkab.bps.go.id/indicator/23/37/3/persentase-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>

Maulana, P. (2021). *Pemkab Muaraenim Tanda Tangani MoU Dukungan PT Bukit Asam Tbk*. Wikipedia. Retrieved February 15, 2024, from https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/09/pemkab-muaraenim-tanda-tangani-mou-dukungan-pt-bukit-asam-tbk#google_vignette

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2023). *Rapat Evaluasi Pendataan Awal Regsosek di Kabupaten Muara Enim untuk Mengatasi Kemiskinan*. Muara Enim Kab.Go.Id. Retrieved November, 2023, from https://www.muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/3547

PT Bukit Asam, Tbk. (2023). *Empowering Community for Better Life: Pemberdayaan Masyarakat untuk Kehidupan Lebih Baik*. https://www.ptba.co.id/uploads/ptba_laporan_pkbl/20230530082839-2023-05-30ptba_laporan_pkbl082836.pdf

PT Bukit Asam, Tbk. (2023). *2022: Maximizing Innovation for National Energy Security*.

https://www.ptba.co.id/uploads/ptba_laporan_tahunan/20230530082636-2023-05-30ptba_laporan_tahunan082633.pdf

Peraturan dan Regulasi

Bupati Muara Enim, 2011. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 568/KPTS/Bappeda/2011 Tentang Pembentukan Forum *Corporate Social Responsibility* - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim.

Bupati Muara Enim, 2011. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2011 Tentang *Corporate Social Responsibility* - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim. from jdih.muaraenimkab.go.id

Bupati Muara Enim, 2022. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

Sumber Lainnya

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026*.

PT Bukit Asam Tbk. (2023). *2023 Laporan TJSJL Februari PT Bukit Asam Tbk*.

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran (2023). *Laporan Akhir Social Return on Investment (SROI) Program Eco Agrotomation PT Bukit Asam Tbk*.

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat, , Universitas Padjadjaran (2022). *Laporan Social Return On Investment (SROI) Preparation and Planning Program PPM Manufaktur PT Bukit Asam Tbk*